



MEDIA SOSIAL DAN PERPECAHAN: INTOLERANSI BERAGAMA DAN KONSUMERISME KONTEMPORER

Madaneo Wahyu Putra Wibowo ^{a,1}

^a Universitas Gajah Mada

¹ Corresponding Author, email: madaneowahyu2020@gmail.ugm.ac.id (Wibowo)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 06-02-2022

Revised: 12-03-2022

Accepted: 21-02-2022

Published: 01-06-2022

Keywords:

Religious intolerance, simulacrum, essential-religion,

ABSTRACT

Indonesia has long been known as a country that is synonymous with diversity, especially religious diversity. However, in the midst of this diversity, the Indonesian people can still live in harmony. As a result, many countries are attracted by the way of life of the Indonesian people who have managed to cope with a diverse life. In response to this, the Government of Indonesia has declared 2022 as the 'Year of Tolerance' in an effort to establish Indonesia as a benchmark for world tolerance. Unfortunately, the facts show that religious intolerance still occurs quite a lot every year. This is the impact of the widespread use of social media in contemporary times. Therefore, this study seeks to find solutions to overcome religious intolerance in Indonesia that occurs in contemporary times. This study uses a literature study research method and uses an analytical-philosophical approach. Through this research, it is found that religious intolerance that occurs in contemporary times is the impact of contemporary society's desire to identify and differentiate themselves. This desire is fulfilled through the consumption of the sign or simulacrum. As a result, essential-religion is reduced to an ideological-religion which is the cause of the emergence of exclusivism in society. As a solution, a war of discourse and habituation of discussion is needed which is also carried out through social media.

PENDAHULUAN

Sudah sejak Indonesia belum berdiri sebagai suatu negara formal, perbedaan telah menjadi hal yang inheren dengan kehidupan masyarakat Indonesia (Nusantara kala itu). Dari berbagai aspek perbedaan yang ada, perbedaan agama merupakan salah satu aspek yang paling signifikan dan tercatat dengan baik dalam berbagai laporan sejarah. Salah satu catatan terkenal mengenai perbedaan agama yang ada di Indonesia pada masa silam adalah Kakawin Sutasoma yang ditulis pada abad ke-14 oleh Mpu Tantular di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Dalam pupuh 139 bait 5 tulisan tersebut tertulis

kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, yang berarti 'berbeda-beda tetapi tetap satu, karena kebenaran adalah satu dan tidak mendua'. Kalimat tersebut merupakan upaya pemerintahan Hayam Wuruk untuk menghindari perpecahan yang timbul karena adanya dua agama negara yang berkoeksistensi dengan jumlah pengikut yang hampir sama (Hindu dan Buddha) (Aryadini, 2015).

Kalimat Bhinneka Tunggal Ika di atas, pada akhirnya diadaptasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai semboyan negara. Di satu sisi kalimat tersebut menjadi pengikat bangsa Indonesia yang beragam

agar tetap bersatu di tengah berbagai keragaman yang ada. Di sisi lain, kalimat tersebut juga merupakan rangkuman keseluruhan realitas sosial bangsa Indonesia: kendati bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman, persatuan dan kerukunan nasional dapat tetap terwujud.

Persatuan dan kerukunan yang terwujud di tengah keberagaman masyarakat Indonesia membuat banyak pihak kagum. Alhasil, banyak pihak yang hendak belajar dari Indonesia mengenai kerukunan di tengah keberagaman tersebut. Dengan kata lain, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi barometer (tolok ukur) toleransi dunia. Guna mempersiapkan hal tersebut, pemerintah mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Pencanangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi merupakan upaya pemerintah untuk mempererat kerukunan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia sekaligus upaya konsolidasi budaya yang beragam. Pemerintah berupaya memenuhi target tersebut melalui kerja sama dengan berbagai stakeholders, termasuk organisasi berbagai di Indonesia (Al-Asyhar, 2022).

Upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi budaya dan mempererat toleransi merupakan hal yang tepat dilakukan. Hal tersebut tidak semata-mata karena impian Indonesia untuk menjadi barometer toleransi dunia, tetapi juga karena tingkat intoleransi beragama itu sendiri masih cukup tinggi di Indonesia. Survei yang diselenggarakan oleh Wahid Institute menunjukkan bahwa presentase tren intoleransi di Indonesia meningkat. Pada 2020, persentase tren intoleransi di Indonesia tercatat sebesar 46% dan meningkat menjadi 54% pada penghujung 2021. Selain itu, laporan tahunan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia yang dirilis oleh SETARA Institute pada Februari 2022 menunjukkan bahwa jumlah tindakan intoleransi masih cukup tinggi. Terdapat 318 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2021. Kendati angka ini menurun

jika dibandingkan tahun sebelumnya--pada 2020 terjadi 424 tindakan--hasil yang diperoleh SETARA Institute tidak dapat sepenuhnya mengindikasikan kemajuan dalam hal toleransi di Indonesia karena keterbatasan pengumpulan data yang dialami SETARA Institute (SETARA Institute, 2022). Realitas yang menampak ini merupakan ironi yang memilukan bagi bangsa Indonesia: ketika Indonesia berupaya menjadi tolok ukur toleransi dunia, persentase intoleransi di Indonesia malah cukup besar, bahkan terus meningkat.

Intoleransi beragama yang meningkat di atas terjadi seiring dengan munculnya era disrupsi teknologi. Pada era disrupsi, batas-batas fisik antar manusia menghilang (Kasali, 2017). Hilangnya batas-batas fisik tersebut merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, sehingga mengacaukan tatanan sosial yang telah mapan (Chrismastianto, 2018). Kehidupan sosial masyarakat pada masa disrupsi tidak lagi terpusat pada dunia-riil, melainkan dunia maya (Handayani, 2020). Dunia maya--yang kini umumnya terwujud dalam media sosial--mampu memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap duni-riil (Bahri, 2021). Dengan kata lain, media sosial memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan pola pikir masyarakat kontemporer.

Penelitian yang dirilis oleh LIPI pada 2020 membuktikan peran signifikan media sosial dalam pembentukan pola pikir masyarakat kontemporer, terutama terkait kenaikan persentase intoleransi di Indonesia. Keterbukaan yang terdapat dalam media sosial terbukti memberi peluang bagi muncul dan merebaknya berbagai pandangan, termasuk intoleransi. Dalam media sosial, intoleransi mewujud dalam rupa ujaran kebencian. Melalui ujaran kebencian yang dengan bebas tersebar di media sosial, pandangan intoleransi dengan mudah tersebar dan tertanam dalam diri sebagian masyarakat Indonesia. Maraknya penyebaran pandangan intoleransi tersebut juga tidak terlepas dari cara kerja media

sosial yang berbasis pada algoritma kecerdasan buatan (Pamungkas, 2020). Dampaknya, masyarakat senantiasa disuguhkan dengan informasi-informasi yang terbatas pada minat yang mereka miliki. Ketika minat yang mereka tunjukkan adalah minat terhadap wacana intoleransi, maka wacana tersebut akan terus ditampilkan oleh media sosial, dikonsumsi masyarakat, dan memperkuat intoleransi dalam diri masyarakat.

Berdasarkan persoalan yang terjadi, sebagaimana dipaparkan di atas, merumuskan solusi untuk mengentaskan toleransi dan mengembalikan semangat persatuan di tengah perbedaan merupakan hal yang krusial. Solusi yang dihasilkan, selain bertujuan untuk memenuhi misi yang diusung melalui pencanangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi juga bertujuan untuk merajut kembali persatuan dan mempertahankan eksistensi Indonesia. Solusi yang ditemukan nantinya juga bermanfaat untuk menghasilkan ketertiban dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam sekaligus memenuhi tugas negara untuk mewujudkan pengayoman yang maksimal bagi seluruh warga negara.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode studi literatur untuk memaparkan premis-premis sebagai bahan penelitian guna membangun argumen pada bagian akhir tulisan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Zed (2008) yang menyebut bahwa studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah data penelitian. Lebih lanjut, Zed memaparkan bahwa studi literatur berperan penting dalam pengembangan aspek teoritis maupun praktis penelitian. Oleh karena penulis dalam tulisan ini berupaya menghasilkan metode praktis melalui analisis dan pengembangan terhadap beberapa teori guna mengatasi intoleransi, metode studi literatur merupakan metode yang tepat digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intoleransi: Gejala Keterlupa Esensi

Intoleransi beragama sebagai suatu fenomena sosial merupakan persoalan yang selalu hadir seiring dengan hadirnya agama. Sepanjang sejarah, intoleransi beragama telah menggerakkan manusia untuk berkonflik yang secara konkret terwujud dalam peperangan fisik, konflik politik, dan tindak perselisihan lainnya. Perang salib, Perang 30 Tahun, pembantaian masyarakat Yahudi di masa 'Wabah Hitam' (Black Plague), hingga konflik dalam negeri kontemporer, seperti konflik Aceh dan Ambon didasari oleh intoleransi beragama. Fakta yang terjadi menunjukkan sebuah ironi: agama yang menganjurkan pengikutnya untuk mengamalkan cinta kasih justru menjadi dalih bagi berbagai peristiwa berdarah sepanjang sejarah (Haryatmoko, 2017).

Haryatmoko dalam *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi* (2017) menjabarkan bahwa intoleransi dapat terjadi karena adanya ketidakmampuan suatu kelompok agama dan individu di dalamnya untuk menerima pihak "yang lain". "Yang berbeda" dalam kaitannya dengan intoleransi beragama merujuk pada kelompok agama di luar kelompok agama intoleran. Haryatmoko melanjutkan, ketidakmampuan menerima "yang berbeda" tersebut terjadi lantaran pada kelompok agama intoleran, agama hanya dipandang sebagai pemberi identitas. Sebagai pemberi identitas, agama direduksi menjadi sekedar ideologi yang hanya berperan sebagai pemberi validitas bagi tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok agama intoleran tersebut. Tindakan-tindakan yang sejatinya hanya bertujuan untuk menjaga kemurnian identitas mereka

tersebut (agama-ideologis yang mereka anut) kerap disamakan dengan tindakan membela agama yang sejati. Tafsir-tafsir yang diberikan para pemuka agama berbasis agama-ideologis yang bersifat politis (yang terwujud dalam berbagai ujaran bernada kebencian) mendorong manifestasi tindakan 'pelestarian identitas' tersebut. Alhasil, ketika ujaran-ujaran provokatif disampaikan, berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi kelompok--dan manusia--lain dilakukan dengan dalih membela agama demi menjaga kemurnian identitas kelompok.

Di sisi lain, agama yang sejati (agama-esensial) memiliki fungsi dan peran yang berbeda dari agama-ideologis di atas. Joachim Wach (dalam Georgia, 1992, h. 304) menyebut bahwa agama-sejati berusaha menghadirkan hubungan pribadi antara Tuhan dan manusia melalui terciptanya pengalaman religius. Agama-esensial tersebut, baik secara teori maupun praktik, menekankan pentingnya kebersamaan dan hubungan sosial yang berkelanjutan antar sesama anggota masyarakat (Wach, 2019). Oleh karena itu, tindakan intoleransi yang dijiwai oleh agama-ideologis bukan merupakan tindakan yang terkait dengan agama esensial. Dengan demikian, sejatinya kelompok dan individu intoleran telah mengabaikan agama yang sejati dan beralih pada suatu ideologi politik berdalih agama yang pada tingkat individu dipakai untuk mengejar kepentingan tertentu.

Konsumerisme Kontemporer

Keterlupaan terhadap agama-esensial dalam diri masyarakat kontemporer merupakan salah satu manifestasi dari perubahan pola produksi dan konsumsi masyarakat kontemporer. Pergeseran tersebut terjadi lantaran kegiatan

konsumsi tidak lagi didasari pada upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, melainkan hasrat akan suatu komoditas konsumsi. Konsumsi tidak lagi didasari pada latar belakang pemenuhan kebutuhan ekonomi semata-mata, melainkan turut ditentukan oleh faktor sosiologis dan psikologis (Armawi, a2007). Faktor produksi, pada akhirnya, tidak dideterminasi oleh permintaan atas konsumsi kebutuhan, melainkan karena kepanikan konsumen sebagai akibat dari kecemasan karena tidak mampu memenuhi hasrat (Baudrillard, 1999). Jean Baudrillard menyebut bahwa perubahan pola konsumsi yang berubah pada masyarakat kontemporer tersebut dimotivasi oleh tujuan mengidentifikasi diri dalam suatu struktur masyarakat (Sarup, 2008). Suatu barang diminati--dan oleh karenanya dikonsumsi--apabila barang tersebut mampu menunjukkan posisi konsumennya dalam suatu struktur masyarakat. Kapasitas untuk menunjukkan posisi konsumen dalam suatu struktur masyarakat tersebut tersimpan dalam simbol atau tanda yang dilekatkan oleh produsen dan/atau masyarakat pada suatu komoditas konsumsi, seperti citra yang ditampilkan dalam iklan atau merek suatu komoditas konsumsi. Esensi dari suatu komoditas dipandang kurang penting daripada citra atau predikat yang melekat pada dirinya karena kemampuannya mengidentifikasi konsumen.

Dalam *The Consumer Society: Myths and Structures* (1999), Baudrillard memaparkan bahwa pola konsumsi masyarakat sepanjang sejarah ditentukan oleh kebutuhan yang berlandaskan pada kesenangan. Dalam masyarakat hari ini, kesenangan dapat dicapai ketika kesetaraan

tercapai. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pemenuhan kesetaraan telah menjadi cita-cita konsumen paling utama yang harus dicapai. Kesetaraan yang diinginkan oleh masyarakat hari ini tidak semata-mata berwujud abstrak (kesetaraan demokratis), seperti kesetaraan di hadapan hukum atau hak-hak politik--sebagaimana yang dicita-citakan di masa modern sejak Descartes hingga Kierkegaard--melainkan kesetaraan yang nampak secara fisik pada persona individu. Dengan kata lain, kesetaraan yang didambakan masyarakat kontemporer bukan merupakan kesetaraan demokratis, melainkan kesetaraan individualis yang bersifat personal.

Lebih lanjut, Baudrillard (1999) menjelaskan bahwa kesetaraan individualis masyarakat kontemporer terwujud dalam tuntutan--yang mengarah pada hasrat--akan kesetaraan di hadapan objek-objek dan tanda-tanda yang termanifestasi dalam kebutuhan sosial dan kesenangan. Tuntutan--dan hasrat--akan kebutuhan sosial dan kesenangan mendorong masyarakat kontemporer untuk berkompetisi satu sama lain melalui proses identifikasi dan diferensiasi. Hasrat diferensiasi mendorong

seseorang untuk terlihat berbeda dari orang lain, memiliki identitas yang unik, terutama diferensiasi terhadap kelas yang berada di bawahnya. Hasrat identifikasi merupakan konsekuensi dari hasrat diferensiasi: seseorang terdorong untuk menggabungkan diri dengan suatu kelompok, memperoleh identitas dari kelompok tersebut, terutama identifikasi terhadap kelas yang berada di atasnya. Hasrat akan identifikasi dan diferensiasi dipenuhi melalui proses konsumsi terhadap komoditas produksi. Namun, oleh karena kapabilitas produksi komoditas terbatas, tetapi di sisi lain hasrat akan identifikasi dan diferensiasi tidak terbatas, maka konsumsi tidak dapat didasarkan pada kuantitas komoditas yang tersedia di pasar, melainkan pada tanda-tanda sosial--yang berwujud kualitatif--yang dapat dengan mudah dimodifikasi. Esensi yang dimiliki komoditas produksi (yang terwujud dalam nilai guna dan nilai tukarnya) mulai dilupakan dan digantikan dengan jaringan penanda yang dimiliki komoditas tersebut yang memiliki kemampuan tak terbatas untuk membangkitkan dan memenuhi hasrat (Sarup, 2008).

Gambar 1

Bagan genealogi konsumsi masyarakat terhadap tanda



Dokumentasi: Penulis

Tanda-tanda yang digunakan masyarakat kontemporer guna mengidentifikasi diri tertanam dalam barang-barang hasil produksi dan berbagai substansi lain yang dipandang mampu untuk memberikan identifikasi dan diferensiasi pada persona (Sarup, 2008). Tanda-tanda tersebut terwujud dalam predikat-predikat yang melekat pada suatu merek atau jenis komoditas tertentu. Predikat 'super mahal', 'mewah', 'mempererat pertemanan', dsb, dilekatkan pada komoditas produksi agar pemakainya dapat menunjukkan perbedaan dengan kelompok lainnya dan diidentifikasi dalam kelompok yang diinginkannya. Sebagai contoh, seorang dengan jumlah kekayaan material yang cenderung besar memilih membeli tas Louis Vuitton untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelas sosial 'orang kaya', 'sultan', 'crazy rich'; dan membedakan dirinya dari 'kelas menengah', 'melarat', 'orang biasa'.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tanda-tanda yang berwujud predikat tersebut tidak memiliki rujukan pada kenyataan (esensi) yang diwakili oleh nilai guna dan nilai tukar komoditas produksi. Sebagai contoh, predikat 'mewah' yang mewakili Louis Vuitton tidak mewakili esensi tas, yang diwakili oleh predikat 'mampu membawa barang'. Tanda yang tidak memiliki rujukan pada kenyataan, yang sama sekali berbeda dengan realitas suatu komoditas, disebut sebagai simulacrum (Saumantri & Zikrillah, 2020). Simulacrum tercipta dalam dunia simulasi, dunia tanda yang di dalamnya realitas-riil terwujud dalam berbagai citra atau refleksi. Ketika dalam dunia simulasi, simulacrum yang hadir di dalamnya menjadi sangat kompleks dan rumit, masyarakat yang mengakses dunia tanda tersebut dapat jatuh dalam situasi hiperrealitas. Pada ranah konkret, dalam

kehidupan kontemporer dunia simulasi terwujud dalam televisi, media sosial, surat kabar, dsb. Dalam dunia simulasi tersebut, simulacrum dalam bentuk iklan-iklan dan berbagai upaya komersialisasi lainnya 'menipu' masyarakat dengan realitas-maya yang ditampilkan (Baudrillard, 1999). Menurut Baudrillard, apa yang nyata bukan lagi realitas yang dihasilkan melalui terciptanya hubungan langsung antara manusia dan dunia, melainkan apa yang ditampilkan media melalui iklan. Iklan yang ditandai dengan propaganda dan komersialisasi simulacrum telah menghasilkan dampak ekstasi komunikasi; iklan telah menginvasi keseharian manusia (Baudrillard, 1983).

Agama sebagai Komoditas: Akar Intoleransi

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa komoditas produksi pada masa kontemporer merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi diri dalam suatu kelompok. Kepastian identitas yang ditunjukkan secara fisik menjadi hal yang digandrungi masyarakat kontemporer sebagai upaya untuk memperoleh kesenangan. Kepastian identitas di tengah arus ketidakpastian dunia dewasa ini menambah minat sebagian kelompok masyarakat untuk memanfaatkan agama sebagai komoditas sebagai akibat dari berbagai perubahan yang terjadi, terutama di bidang teknologi dan sains.

Hal di atas sejalan dengan pandangan Pamungkas (2020) mengenai peningkatan intoleransi beragama di Indonesia. Pamungkas menjabarkan bahwa dunia hari ini semakin mengglobal, dalam artian, kehilangan batas-batas yang memberi kepastian mengenai identitas seseorang. Hal tersebut merupakan akibat dari perubahan di bidang sains dan teknologi yang terjadi

secara masif sepanjang abad ke-20 hingga awal abad ke-21 ini. Dampaknya, masyarakat kontemporer berupaya mencari kepastian dengan berpegang pada entitas atau suatu konsep yang menawarkan kepastian. Dari berbagai entitas yang ada, agama merupakan satu dari sekian banyak entitas yang menjadi pegangan manusia di tengah ketidakpastian yang merajalela. Tegasnya, agama menjadi alat identifikasi masyarakat di tengah ketidakpastian posisi dan identitas dunia yang terus menerus berubah di masa kontemporer.

Kembali pada pandangan Haryatmoko (2018), agama yang direduksi menjadi sekedar pemberi identitas merupakan agama-ideologis yang berbeda dari agama-esensial. Dengan kata lain--mengacu pada Baudrillard--agama-ideologis merupakan simulacrum dari 'realitas agama-esensial' yang tidak memiliki rujukan kepada realitas-riil. Pandangan Pamungkas (2020) memperkuat hasil kajian Baudrillard (1999), bahwa kebutuhan masyarakat kontemporer akan identifikasi merupakan alasan yang dipakai sebagai penentu keputusan seseorang memeluk--atau mengikuti--suatu agama atau aliran tertentu di dalamnya. Ketika upaya untuk mengidentifikasi diri tercapai, seseorang mengeklusifkan dirinya dari 'yang-lain'. Ia memandang mereka yang berada di luar dirinya sebagai sesuatu yang berbeda dari dirinya: sebagai 'bukan-aku', dan oleh karenanya mereka harus disingkirkan agar identitasku tetap murni. Di tengah ketidakpastian posisi dan identitas, ia mengidentifikasi dirinya dalam kelompok 'yang saleh', 'yang benar', 'yang akan masuk surga', dll, sementara mereka yang berada di luar kelompoknya sebagai 'yang kafir', 'yang sesat', 'yang akan pergi ke neraka', dst.

Peran Media Sosial

Penelitian oleh LIPI pada bagian pendahuluan menunjukkan bahwa keterbukaan media sosial menjadi penyebab mudahnya wacana agama-ideologis yang termanifestasi dalam intoleransi beragama untuk menyebar dan menanamkan pengaruhnya (Pamungkas, 2020). Secara spesifik, cara kerja media sosial-lah yang membuat wacana agama-ideologis dengan mudah tersebar, menanamkan pengaruhnya, dan sulit diatasi. Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan Baudrillard yang menyebut bahwa simulacrum secara bebas disebarkan secara masif dalam dunia maya, seperti koran, televisi, dan--yang paling relevan dengan masa kini--media sosial (Baudrillard, 1999).

Sebagaimana dipaparkan pada bagian pendahuluan, media sosial merupakan ruang hidup yang memiliki peran signifikan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Peran signifikan tersebut diperkuat dengan jumlah pengguna media sosial yang meningkat dari tahun ke tahun. Dilansir dari DataIndonesia.id, We Are Social mencatat terdapat 191 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia pada awal tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,35% dari tahun sebelumnya (Mahdi, 2022). Jumlah yang besar tersebut menunjukkan bahwa media sosial merupakan ruang yang menarik dan dapat memenuhi hasrat kesenangan yang digandrungi masyarakat kontemporer.

Terkait keterjangkauan informasi, media sosial bekerja dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ AI) untuk menentukan informasi-informasi (konten) yang akan ditampilkan pada pengguna. Tujuan dari penggunaan kecerdasan buatan adalah untuk membuat pengguna mengakses selama mungkin media

sosial tersebut dengan cara menunjukkan konten-konten atau informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna tersebut. Tegasnya, media sosial bekerja dengan mengandalkan kecerdasan buatan melalui pembelajaran terhadap preferensi atau kecenderungan yang dimiliki penggunanya sebagai parameter untuk menyajikan informasi dan mengesampingkan kualitas informasi yang ditampilkan (Reviglio & Agosti, 2020).

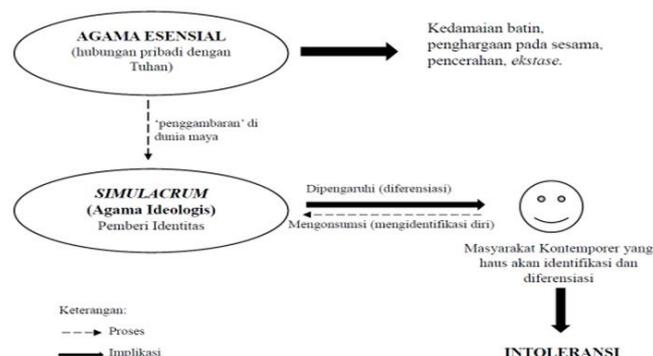
Hasil dari 'pembelajaran' yang dilakukan kecerdasan buatan yang ditunjukkan dengan menampilkan informasi (konten) yang sesuai dengan preferensi penggunanya adalah algoritma. Corea (2019) memaparkan, hal tersebut dapat terjadi lantaran kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menciptakan algoritma baru seturut algoritma awal yang diberikan padanya. Algoritma awal kecerdasan buatan yang dipakai dalam media sosial memungkinkan kecerdasan buatan untuk menciptakan algoritma seturut preferensi setiap pengguna. Algoritma tersebut tercipta melalui sintesis data-data preferensi pengguna di masa lalu yang terkumpul dalam basis data (database) media sosial tersebut.

Preferensi tersebut dapat ditunjukkan melalui, misalnya, kiriman yang disukai pengguna, tagar yang diikuti, dan/atau pilihan kata yang dipakai pengguna untuk menuliskan kiriman di media sosial.

Data yang terkumpul dalam basis data yang dijadikan bahan pertimbangan kecerdasan buatan dalam menentukan informasi yang akan ditampilkan pada pengguna tersebut tidak memiliki kualitas apapun (Corea, 2019). Kualitas yang dimaksud merujuk pada benar, salah; baik, buruk; toleran, atau intoleran, dll. Alhasil, wacana-wacana agama-ideologis yang termanifestasi dalam bentuk ujaran kebencian, dapat dengan bebas bertebaran di media sosial.

Didorong oleh tendensi untuk mengidentifikasi diri di tengah ketidakpastian dunia hari ini, kecerdasan buatan membentuk algoritma yang akan senantiasa menunjukkan konten-konten yang terkait dengan wacana agama-ideologis. Dengan demikian, wacana tersebut akan senantiasa disaksikan oleh pengguna yang memiliki preferensi mengidentifikasi diri dan memiliki pengaruh kuat untuk membentuk pandangan pengguna tersebut: menjadi pribadi intoleran yang mengabaikan agama-esensial.

Gambar 2
Bagan genealogi konsumsi masyarakat terhadap tanda



Dokumentasi : Penulis

Jalan Keluar

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa intoleransi beragama merupakan dampak dari keterlupaannya masyarakat kontemporer akan agama-esensial yang didorong oleh penggunaan media sosial berbasis algoritma. Oleh karena itu, guna mengentaskan intoleransi beragama--dan nantinya memenuhi capaian pencanangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi--terdapat dua hal yang harus menjadi titik tolak upaya perumusan solusi. Pertama, masyarakat kontemporer harus 'diingatkan' kembali dengan konsep agama-esensial agar peran agama sebagai semata-mata agama-ideologis yang memotifasi tingkah laku masyarakat intoleran dapat dihapuskan, dan oleh karenanya, intoleransi beragama itu sendiri dapat diatasi. Kedua, media sosial Indonesia perlu dipersiapkan menjadi tempat yang ramah terhadap perbedaan, sehingga masyarakat Indonesia yang beragam yang banyak menghabiskan kesehariannya di media sosial memiliki ruang aman untuk berekspresi sekaligus memperoleh informasi.

Generasi muda Indonesia--dengan rentang usia 18-34 tahun--merupakan agen perubahan yang tepat untuk melaksanakan perlawanan terhadap intoleransi. Pemilihan generasi muda sebagai agen perubahan tersebut bukan tanpa alasan, sebab kapabilitas mumpuni yang dimiliki generasi muda memainkan peran besar dalam upaya pengentasan intoleransi beragama di Indonesia. Deal dkk (dalam Badan Pusat Statistik RI, 2018, h. 68) menyebut bahwa generasi muda memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya sebagai dampak dari kepiawaian mengakses teknologi yang juga lebih mumpuni dari generasi sebelumnya. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi ini

menjadikan generasi muda memiliki kapabilitas yang lebih baik untuk menyusun strategi dan substansi upaya perlawanan terhadap intoleransi beragama. Selain itu, survei Statista pada 2020 menunjukkan bahwa 65,7% pengguna media sosial adalah generasi muda (Annur, 2020). Jumlah besar yang dimiliki generasi muda menjadi faktor penentu berikutnya, sebab dengan jumlah besar tersebut, agen perlawanan dapat mendominasi arus informasi di media sosial.

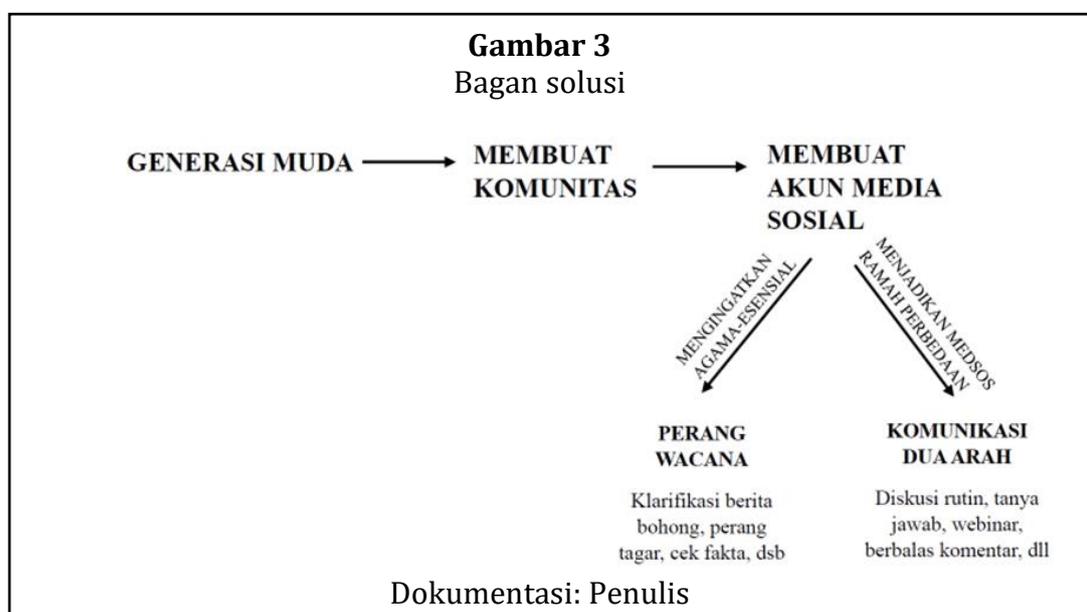
Untuk memulai upaya perlawanan, pertama-pertama generasi muda harus membuat suatu kelompok (komunitas) dengan visi jelas, yaitu mengentaskan intoleransi beragama. Komunitas tersebut perlu dimanifestasikan di dunia maya dalam bentuk akun media sosial. Melalui akun media sosial yang tersebar di berbagai platform media sosial (Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dll), wacana intoleransi akan dilawan dengan perang wacana. Wacana-wacana perdamaian dan nilai-nilai yang diusung oleh agama-esensial (perdamaian, toleransi, tenggang rasa, kasih sayang, dan sifat ilahiah lainnya) akan disebarkan secara masif dan repetitif oleh akun tersebut. Perang wacana tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk, misalnya klarifikasi mengenai pandangan bernada kebencian, pelurusan terhadap berita-berita bohong, perang tagar, berbalas kiriman dengan akun-akun intoleran, dan pembuatan konten edukasi. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat mengenai nilai-nilai yang diusung agama-esensial melalui penguasaan arus informasi yang pada akhirnya dapat menciptakan algoritma yang akan menuntun masyarakat pada wacana-wacana toleransi. Nantinya, wacana-wacana toleransi akan menjadi wacana yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan lambat laun akan mengubah cara pandang

masyarakat, terutama mereka yang telah terpapar intoleransi.

Selain melalui perang wacana, generasi muda juga perlu secara aktif mengadakan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Komunikasi dua arah ini terwujud melalui aktifitas berbalas komentar, siaran langsung di media sosial, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui kolom komentar setiap kiriman dan/atau pesan langsung, serta webinar yang akan diselenggarakan secara rutin. Para generasi muda juga perlu memfasilitasi adanya dialog terbuka antar masyarakat dari berbagai golongan, yang di dalamnya setiap orang dari berbagai latar belakang tersebut dapat saling memperkenalkan keunikan latar belakangnya, saling bertanya, dan meluruskan pandangan yang keliru. Dialog ini juga diselenggarakan secara daring melalui media sosial, misalnya melalui Zoom Meeting, Google Meet, Discord, sembari disiarkan langsung melalui YouTube. Dengan demikian, ketidakmampuan untuk menerima “yang berbeda” yang mewujud dalam intoleransi akan lambat laun teratasi melalui keterbukaan dan perasaan setara yang

ditumbuhkan dalam dialog tersebut. Alhasil, ketika perbedaan dapat dimaklumi dan iklim diskusi tumbuh dalam ruang media sosial Indonesia, media sosial Indonesia dapat menjadi tempat yang ramah bagi perbedaan.

Ketika upaya-upaya di atas berhasil dilakukan, lambat laun manusia Indonesia intoleran akan kembali pada manusia Indonesia yang menghargai perbedaan. Mereka yang tidak terpengaruh, akan semakin memaklumi perbedaan dan memiliki wawasan yang lebih luas tentang “yang berbeda” dari mereka. Selain upaya di atas mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dunia maya--setidaknya dalam lingkup Indonesia--dapat lebih ramah terhadap keberagaman Indonesia. Data dan informasi yang mayoritas tersedia--yang dijadikan pertimbangan oleh kecerdasan buatan untuk membuat keputusan--adalah data yang mendukung keberagaman dan oleh karenanya memiliki pengaruh baik terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, baik di dunia maya maupun dunia riil.



SIMPULAN

Intoleransi beragama merupakan hal yang kompleks. Pada masa kontemporer, intoleransi beragama tumbuh dalam situasi disrupsi teknologi. Akibatnya, teknologi—terutama media sosial—memiliki peran yang signifikan terhadap meningkatnya intoleransi beragama. Hasrat mengonsumsi tanda yang tidak memiliki rujukan pada realitas-riil yang dimiliki masyarakat kontemporer diafirmasi oleh dunia tanda, dunia simulasi, yang terwujud dalam media sosial. Agama-ideologis yang merupakan tanda-tanpa-realitas menjadi salah satu komoditas yang digemari masyarakat kontemporer sebagai dampak dari krisis identitas yang ramai terjadi di dunia hari ini sebagai dampak dari perubahan di berbagai bidang yang amat cepat. Untuk mengatasi hal tersebut, generasi muda Indonesia – sebagai agen yang paling mungkin—perlu menyadarkan kembali masyarakat intoleran mengenai nilai-nilai yang diusung agama-esensial sekaligus menjadikan media sosial Indonesia sebagai ruang aman bagi perbedaan.

Pada akhirnya, cita-cita pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai barometer toleransi dunia melalui pencanangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi tidak dapat dicapai dengan cara yang mudah dan dilakukan oleh segelintir pihak. Semua anggota masyarakat harus menyadari perannya dan berkontribusi seturut perannya tersebut dalam melaksanakan perlawanan terhadap intoleransi. Setiap anggota masyarakat harus menyadari bahwa perbedaan merupakan hal yang inheren dengan eksistensinya sebagai masyarakat Indonesia, dan oleh karena itu, penghargaan terhadap perbedaan tersebut merupakan hal yang krusial. Setiap anggota masyarakat harus menyadari bahwa semua manusia adalah sama dan setara, dan setiap

orang, tanpa terkecuali, adalah makhluk Tuhan yang berharga, bernilai, dan tercipta sebagai sarana setiap orang untuk mengenal diri sendiri, mengenal sesama dan dunianya, dan mengenal Tuhan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyhar, T., 2022. *Pencanangan Tahun Toleransi 2022*. [Daring] Tersedia di: <https://kemenag.go.id/read/pencanangan-tahun-toleransi-2022> [Diakses pada 19 April 2022].
- Annur, C. M., 2020. *Berapa Usia Mayoritas Pengguna Media Sosial di Indonesia?*. [Daring] Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia> [Diakses pada 2 Januari 2022].
- Armawi, A., 2007. *Dari Konsumerisme ke Konsumtivisme (Dalam Perspektif Sejarah Filsafat Barat)*. *Jurnal Filsafat*, XVII(3), pp. 314-327.
- Aryadini, W., 2014. *Asal-Usul Bhinneka Tunggal Ika*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, 2018. *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Bahri, S., 2021. *Literasi Digitas Menangkal Hoaks Covid-19 di Media Sosial*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, X(1), pp. 16-28.
- Baudrillard, J., 1983. *Simulations*. Massachusetts: MIT Press.
- Baudrillard, J., 1999. *The Consumer Society: Myths & Structures*. London: SAGE.
- Christmastianto, I. A. W., 2020. *Quo Vadis of Indonesia's Education in Disruption Era: Teacher's Role in Value and Technology Perspective*. Tangerang, SCITEPRESS, pp. 83-87.

Corea, F., 2019. *An Introduction to Data: Everything You Need to Know About AI, Big Data and Data Science*. Cham: Springer .

Georgia, R. T., 1992. Joachim Wach and The Study of Religion: A Comparative Approach. *Religious Education*, LXXXVII(2), pp. 299-318.

Handayani, S. A., 2020. *Humaniora dan Era Disrupsi Teknologi dalam Konteks Historis*. Jember, Jember University Press, pp. 19-30.

Haryatmoko, 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kasali, R., 2017. *Disruption: Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Motivasi Saja Tidak Cukup*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mahdi, M. I., 2022. *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*. [Daring] Tersedia di : <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> [Diakses pada 22 April 2022].

Pamungkas, C. 2020. *Intoleransi dan Radikalisme dalam Pertanyaan, dalam C. Pamungkas & Y. S. Permana (Ed). Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 1-19.

Reviglio, U., 2020. *Thingking Outside the Black-Box: The Case for "Algorithmic Sovereignty" in Social Media*. SAGE, VI(2), pp. 1-12.

Sarup, M., 2008. *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta: Jalasutra.

Saumantri, T. & A. Z., 2020. *Teori Simulakra Jean Baudrillard dalam Dunia Komunikasi Media Massa*. *Orasi*, XI(2), pp. 247-260.

SETARA Institute, 2022. *Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di*

Indonesia 2021. [Daring] Tersedia di: <https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-2021/> [Diakses pada 19 April 2022].

Wach, J., 2019. *Sociology of Religion*. 16th ed. Oxon: Routledge.

Zed, M., 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.